

Regional Financial Performance And Its Implications For Human Development: A Study Of Moderation By Capital Expenditure

Kinerja Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Manusia: Studi Moderasi Oleh Belanja Modal

Agin Sugiwa¹, Haryono Umar², Agustina Indriani³, Ria Fitria Andriani⁴

Politeknik Negeri Subang¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute²

Universitas Darma Persada³

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi⁴

aginsugiwa.edu@gmail.com¹, flamboyan24@gmail.com², agustinareni81@gmail.com³,
riafitria@ibm.ac.id⁴

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of regional financial performance, which is measured by the degree of decentralization, regional financial dependence, regional financial independence, effectiveness of local revenue, and growth of local revenue on the Human Development Index, moderated by capital expenditure. This research uses linear regression testing conducted with SPSS 23 software. The research sample consists of districts/cities from 2014 to 2016. The total sample used is 1,007 districts/cities selected using a purposive sampling. Based on the analysis results, it can be concluded that the degree of decentralization has a positive effect on the Human Development Index, regional financial independence has a positive impact on the Human Development Index, and the effectiveness of local revenue has a positive effect on the Human Development Index. Meanwhile, regional financial dependence does not affect the Human Development Index, and the growth of local revenue does not affect the Human Development Index. Capital expenditure strengthens the positive effect between the degree of decentralization and the Human Development Index; capital expenditure strengthens the positive impact between regional financial independence and the Human Development Index. Conversely, capital expenditure does not weaken the adverse effect between regional financial dependence and the Human Development Index, capital expenditure does not strengthen the positive impact between the effectiveness of local revenue and the Human Development Index, and capital expenditure does not strengthen the positive effect between the growth of local revenue and the Human Development Index.

Keywords: *Regional Financial Performance, Degree of Decentralization, Regional Financial Dependence, Regional Financial Independence, Effectiveness of Local Revenue, Growth Of Local Revenue, Capital Expenditures, Human Development Index.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap terhadap indeks pembangunan manusia yang dimoderasi dengan belanja modal. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linear yang dilakukan dengan aplikasi SPSS 23. Sampel penelitian adalah kabupaten/kota periode tahun dari 2014-2016. Jumlah sampel yang digunakan adalah 1.007 kabupaten/kota yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Belanja modal memperkuat pengaruh positif antara derajat desentralisasi dengan indeks pembangunan manusia, belanja modal memperkuat pengaruh positif antara kemandirian keuangan daerah dengan indeks pembangunan

manusia, sedangkan belanja modal tidak memperlemah pengaruh negatif antara ketergantungan keuangan daerah dengan indeks pembangunan manusia, belanja modal tidak memperkuat pengaruh positif antara efektifitas pendapatan asli daerah dengan indeks pembangunan manusia, dan belanja modal tidak memperkuat pengaruh positif antara pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia.

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses menciptakan atau memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diarahkan pada pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta stabilitas nasional, dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan ekonomi, sosial, pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi cerminan keadilan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, anggaran pembangunan manusia perlu diprioritaskan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur.

Secara global, pembangunan juga diwujudkan melalui Millenium Development Goals (MDG's) yang disepakati dalam KTT tahun 2000, dengan fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, termasuk pembiayaan yang lebih memadai untuk masyarakat miskin sebagaimana direkomendasikan oleh UNDP. Pembangunan manusia berkualitas menjadi tanggung jawab moral negara, melalui pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010–2014. Pembangunan nasional Indonesia telah mengadopsi konsep IPM dari UNDP, yang menekankan peningkatan kualitas hidup secara fisik, mental, dan spiritual.

Keberhasilan pemerintahan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dari pembangunan manusianya. Menurut BPS (2016), pembangunan manusia merupakan upaya pemberdayaan dengan fokus pada peningkatan kemampuan dasar agar manusia dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, manusia memiliki peran penting dalam pembangunan, baik sebagai objek maupun penggerak. Namun, pembangunan manusia di Indonesia masih tergolong rendah berdasarkan Human Development Index (HDI) tahun 2015, sebagaimana dilaporkan dalam *Human Development Report 2016* oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Tabel 1. Human Development Index (HDI) Negara-Negara Asean Tahun 2015

Rangking Dunia	Negara	Human Development Index (HDI)	Kategori HDI
5	Singapura	0.925	Very High
30	Brunei Darussalam	0.865	Very High
59	Malaysia	0.789	High
87	Thailand	0.740	High
113	Indonesia	0.689	Medium
115	Vietnam	0,683	Medium
116	Filipina	0,682	Medium
133	Timor Leste	0,605	Medium
138	Laos	0,586	Medium
143	Kamboja	0,563	Medium
145	Myanmar	0,556	Medium

Sumber: Human Development Report 2016 (data diolah kembali)

Berdasarkan *Human Development Report 2016*, Indonesia menempati peringkat 113 dunia dan peringkat ke-5 di ASEAN dengan kategori *Medium Human Development*, bersama enam negara ASEAN lainnya. Kategori ini didasarkan pada skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga indikator utama menurut BPS: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Tahun 2015, nilai IPM Indonesia adalah 69,55—masih tergolong sedang dan menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, daerah diharapkan mampu mengelola keuangan sendiri secara transparan, akuntabel, dan profesional. Struktur APBD menjadi indikator utama kemampuan daerah, terdiri dari pendapatan (termasuk PAD), belanja, dan pembiayaan. Analisis kinerja keuangan daerah, menurut Halim (2008), dapat dilihat melalui rasio-rasio seperti derajat desentralisasi, efektivitas PAD, serta tingkat kemandirian keuangan.

Pendapat Halim (2017) dan Waluyo (2007) menekankan pentingnya daerah memaksimalkan PAD agar tidak tergantung pada pusat. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004, PAD menjadi dasar pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Di sisi lain, belanja daerah juga menjadi fokus utama karena menyangkut penggunaan dana publik. Menurut Mahmudi (2016), belanja mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah, sementara Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa investasi modal daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan manusia melalui sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Beberapa penelitian mendukung pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan dan IPM. Suryaningsih et al. (2015) menemukan bahwa di Provinsi Bali, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan melalui pembangunan daerah. Sementara Sari et al. (2016) menyimpulkan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM. Sebaliknya, penelitian Riphath et al. (2016) di Indonesia Timur menunjukkan tidak ada hubungan kausalitas antara kinerja keuangan dan IPM, sehingga dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui sektor pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang efektif—baik penerimaan maupun pengeluaran—akan mendukung pembangunan yang merata dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Suryaningsih, et. al (2015), Sari, et.al (2016) dan Riphath, et.al (2016), perbedaannya terdapat pada penambahan variabel kinerja keuangan yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) serta belanja modal dijadikan variabel moderasi pada penelitian ini, serta ingin memperkuat penelitian sebelumnya karena terdapat hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riphath, et.al (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kinerja keuangan dengan human development index (HDI). Berdasarkan uraian di tersebut maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan proksi derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah serta belanja modal dan kesejahteraan masyarakat yang di proksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan judul **“Kinerja Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Manusia: Studi Moderasi Oleh Belanja Modal”**.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (2012) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* dalam hal ini memperkejakan *agent* untuk

melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Kinerja Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Badrudin (2012) yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah “suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat”.

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses multidimensional yang bertujuan meningkatkan kapasitas dasar manusia agar dapat hidup sehat, terdidik, dan produktif. Menurut Mahbub ul Haq, pencetus konsep ini, pembangunan harus berfokus pada perluasan pilihan individu dan kebebasan untuk menentukan kehidupan mereka (UNDP, 2016).

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Belanja Modal

Dalam PSAP Nomor 2 pengertian belanja modal merupakan “pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai aset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan data *cross sectional* dan *time series* atau *pooling* untuk data dari pemerintah daerah untuk tahun 2014, 2015 dan 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data silang tempat (*Cross section*) dengan data runut waktu (*time series*). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota se Indonesia sebanyak 1.016 (lima ratus delapan) untuk masing-masing terdiri dari 508 daerah kabupaten/kota pada tahun 2015 dan 508 daerah kabupaten/kota pada tahun

2016. Pengambilan data didasarkan bahwa dalam struktur pemerintahan daerah yang menjadi basis pengelola pemerintahan daerah adalah di kabupaten/kota. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling method*.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas Residual Sebelum Outlier

Uji *kolmogorov-smirnov test* memiliki nilai signifikansi *asympt.sig (2-tailed)* sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan data residual tidak berdistribusi normal. Maka diperlukan uji *outlier* untuk menghilangkan data yang memiliki nilai ekstrim. Grafik normal *P-plot* memiliki titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan arah penyebarannya tidak mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Normalitas Residual Setelah Outlier

Uji *kolmogorov-smirnov test* memiliki nilai signifikansi *asympt.sig (2-tailed)* sebesar 0,077 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima yang berarti model regresi yang digunakan mempunyai *standar error* yang normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat diuji lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Grafik normal *P-plot* memiliki hasil titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi model regresi berganda memiliki model yang diteliti mempunyai jumlah observasi sebesar 920 dengan jumlah variabel bebas sebesar 5. Nilai batas bawah (d_l) yang diperoleh berdasarkan jumlah observasi dan jumlah variabel bebas adalah sebesar 1,88704, dengan batas atas (d_u) sebesar 1,89971. Hasil uji *durbin watson* statistik yang diperoleh dari pengujian adalah sebesar 2,071, nilai *durbin watson* tersebut berada di area $d_l < dw < 4 - d_u$, atau berada di area tidak ada autokorelasi sehingga H_0 diterima yang berarti model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektifitas PAD, pertumbuhan PAD, belanja modal, interaksi derajat desentralisasi dengan belanja modal, interaksi ketergantungan keuangan daerah dengan belanja modal, interaksi ketergantungan kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal, interaksi efektifitas PAD dengan belanja modal yang memiliki nilai nilai tolerance $> 0,10$ atau VIF < 10 atau dengan kata lain bebas dari masalah multikolinearitas. Sedangkan pada variabel interaksi pertumbuhan PAD dengan belanja modal ditemukan adanya masalah multikolinearitas karena memiliki nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10 . Pada umumnya model *moderating regression analysis* akan menyebabkan multikolinearitas yang tinggi antara variabel, misalkan antara variabel X_1 dan variabel moderasi (X_1X_2). Hal ini disebabkan pada variabel moderasi terdapat unsur X_1 dan X_2 . Pemodelan regresi dengan variabel moderasi, besar kemungkinan akan terjadi multikolinearitas. Menurut Gujarati (2012), apabila nilai R^2 lebih kecil dari 0,8 maka masalah multikolinearitas dapat diabaikan karena tidak akan mempengaruhi keakuratan model meskipun telah dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, masalah multikolinearitas dalam persamaan ini dapat diabaikan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Seluruh variabel independen memiliki nilai *sig.* > 0,05. Maka H_0 diterima, artinya varians *error* dinyatakan homogen. Selanjutnya disimpulkan tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Dengan demikian asumsi atas heteroskedastisitas pada model persamaan regresi telah terpenuhi.

Analisis Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Korelasi (R^2)

Nilai *adjusted* R^2 adalah 0,400. Artinya seluruh variabel independen yang terdiri dari DD, KKD, MKD, EPAD, TPAD, RBM, DD*RBM, KKD*RBM, MKD*RBM, EPAD*RBM, TPAD*RBM mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan sisanya sebesar 60% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti sertakan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji F (ANOVA)

Uji F atau *Analysis of Variance* (ANOVA) atau pengujian simultan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Uji F dilakukan dengan perumusan hipotesis:

H_0 : secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen

H_a : secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen

Penentuan nilai signifikan dengan menggunakan nilai probabilitas sebesar 5%, dengan cara pengambilan keputusan:

a. Jika nilai *sig* dari F-stat > 0.05 maka H_0 diterima

b. Jika nilai *sig* dari F-stat < 0.05 maka H_0 ditolak

Hasil hasil dari pengujian atas uji F (ANOVA) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji F (ANOVA)

F	Sig.	Keterangan
56,718	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil Olah SPSS

Berdasarkan tabel 1 nilai F hitung sebesar 56,718 dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi (DD), ketergantungan keuangan daerah (KKD), kemandirian keuangan daerah (MKD), efektifitas PAD (EPAD), pertumbuhan PAD (TPAD), belanja modal (RBM), interaksi derajat desentralisasi dengan belanja modal (DD*RBM), interaksi ketergantungan keuangan daerah dengan belanja modal (KKD*RBM), interaksi kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal (MKD*RBM), interaksi efektifitas PAD dengan belanja modal (EPAD*RBM), interaksi pertumbuhan PAD dengan belanja modal (TPAD*RBM) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (parsial) variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear. Regresi linear digunakan untuk menguji semua variabel dependen yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, pertumbuhan PAD dan belanja modal sebagai variabel moderasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variabel dependen	Ekspektasi	Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Kesimpulan
		Koefisien (β)	Sig. (2 tail)	Sig. (1-tail)	
Constant		0,023	0,482	0,241	
DD	+	0,435	0,000	0,000	H ₁ Diterima
KKD	-	0,151	0,001	0,000	H ₂ Ditolak
MKD	+	0,102	0,048	0,024	H ₃ Diterima
EPAD	+	0,114	0,060	0,030	H ₄ Diterima
TPAD	+	0,007	0,962	0,481	H ₅ Ditolak
RBM	+	0,009	0,774	0,387	
DDxRBM	+	0,338	0,000	0,000	H ₆ Diterima
KKDxRBM	-	-0,117	0,008	0,004	H ₇ Ditolak
MKDxRBM	+	0,409	0,000	0,000	H ₈ Diterima
EPADxRBM	+	-0,145	0,072	0,036	H ₉ Ditolak
TPADxRBM	+	-0,236	0,245	0,123	H ₁₀ Ditolak

Sumber: Hasil Olah SPSS

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi berganda pada taraf kesalahan 5% dan sudah dibagi 2 (dua) karena hipotesis sudah memiliki arah. Uji hipotesis dilakukan untuk memprediksi ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

- Jika probabilitas < 0,05 maka hipotesis diterima
- Jika probabilitas > 0,05 maka hipotesis tidak diterima

Berdasarkan tabel 2 dapat dirumuskan model penelitian dengan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 0,023 + 0,435\text{DD} + 0,151\text{KKD} + 0,102\text{MKD} + 0,114\text{EPAD} + 0,007\text{TPAD} + 0,009\text{RBM} + 0,338\text{DD}*\text{RBM} - 0,117\text{KKD}*\text{RBM} + 0,409\text{MKD}*\text{RBM} - 0,145\text{EPAD}*\text{RBM} - 0,236\text{TPAD}*\text{RBM} + \epsilon$$

Keterangan:

IPM	= Variabel Indeks Pembangunan Manusia
DD	= Variabel Derajat Desentralisasi
TKD	= Variabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
MKD	= Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
EPAD	= Variabel Rasio Efektifitas PAD
TPAD	= Variabel Rasio Pertumbuhan PAD
RBM	= Rasio Belanja Modal
DD*RBM	= Interaksi Rasio Derajat Desentralisasi dan Belanja Modal
TKD*RBM	= Interaksi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Belanja Modal
MKD*RBM	= Interaksi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal
EPAD*RBM	= Interaksi Rasio Efektifitas PAD dan Belanja Modal
TPAD*RBM	= Interaksi Rasio Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)
ϵ	= error term / Nilai Residu

Dari hasil regresi berganda tersebut sebagai hasil implementasi pada tabel 3 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- H₁: Derajat desentralisasi (DD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel DD mempunyai koefisien regresi (β) sebesar 0,435 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, maka H₁ diterima yang berarti DD berpengaruh positif terhadap IPM.

2. H₂: Ketergantungan keuangan daerah (KKD) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel KKD mempunyai koefisien regresi (β) sebesar 0,151 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, maka H₂ ditolak dikarenakan koefisien regresi (β) positif berbeda dengan ekspektasi awal yang seharusnya variabel KKD negatif, yang berarti KKD tidak berpengaruh negatif terhadap IPM.
3. H₃: Kemandirian Keuangan Daerah (MKD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel MKD mempunyai koefisien regresi (β) sebesar 0,102 dengan nilai sig sebesar 0,024 > 0,05, maka H₃ diterima yang berarti MKD berpengaruh positif terhadap IPM.
4. H₄: Efektifitas pendapatan asli daerah (EPAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel EPAD mempunyai koefisien regresi (β) sebesar 0,114 dengan nilai sig sebesar 0,030 > 0,05, maka H₄ diterima yang berarti EPAD berpengaruh positif terhadap IPM.
5. H₅: Pertumbuhan pendapatan asli daerah (TPAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel TPAD mempunyai koefisien regresi (β) sebesar 0,007 dengan nilai sig sebesar 0,481 > 0,05, maka H₅ ditolak yang berarti TPAD tidak berpengaruh terhadap IPM.
6. H₆: Belanja modal (RBM) memperkuat pengaruh positif DD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel DD*RBM mempunyai koefisien regresi (β) sebesar 0,338 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, maka yang berarti RBM dapat memoderasi pengaruh DD terhadap IPM sehingga H₆ diterima.
7. H₇: Belanja modal (RBM) memperlemah pengaruh negatif KKD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel KKD*RBM mempunyai koefisien regresi (β) sebesar -0,117 dengan nilai sig sebesar 0,004 < 0,05, namun KKD tidak berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka yang berarti RBM tidak dapat memoderasi pengaruh KKD terhadap IPM sehingga H₇ ditolak.
8. H₈: Belanja modal (RBM) memperkuat pengaruh positif MKD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel MKD*RBM mempunyai koefisien regresi (β) sebesar 0,409 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, maka yang berarti RBM dapat memoderasi pengaruh MKD terhadap IPM sehingga H₈ diterima.
9. H₉: Belanja modal (RBM) memperkuat pengaruh positif EPAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel EPAD*RBM mempunyai koefisien regresi (β) sebesar -0,145 dengan nilai sig sebesar 0,036 < 0,05, namun koefisien regresi (β) menunjukkan nilai negatif yang berbeda dari ekspektasi awal. Maka yang berarti RBM tidak dapat memoderasi pengaruh EPAD terhadap IPM sehingga H₉ ditolak.
10. H₁₀: Belanja modal (RBM) memperkuat pengaruh positif TPAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel TPAD*RBM mempunyai koefisien regresi (β) sebesar -0,236 dengan nilai sig sebesar 0,123 > 0,05, maka yang berarti RBM tidak dapat memoderasi pengaruh TPAD terhadap IPM sehingga H₁₀ ditolak.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang dilakukan pada BAB sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi (DD) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, *et. al* (2016).
2. Ketergantungan keuangan daerah (KKD) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2008), Mahmudi (2016) dan Waluyo (2007).
3. Kemandirian keuangan daerah (MKD) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Purbadarmaja (2014).
4. Efektivitas pendapatan asli daerah (EPAD) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih, *et. al* (2015).
5. Pertumbuhan pendapatan asli daerah (TPAD) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Halim (2008).
6. Belanja modal berhasil memperkuat pengaruh derajat desentralisasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, *et. al* (2016).
7. Belanja modal tidak berhasil memperlemah pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra, *et. al* (2015).
8. Belanja modal berhasil memperkuat pengaruh kemandirian keuangan daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Purbadarmaja (2014).
9. Belanja modal tidak berhasil memperkuat pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Purbadarmaja (2014).
10. Belanja modal tidak berhasil memperkuat pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Sutaryo (2014).

Daftar Pustaka

- Adiputra, I Made Pradana., Dwiyantari, Ni Kadek Desi dan Darmada, Dewa Kadek. 2015. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. E-Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.3 No.1.
- Amalia, Firda Rizky dan Purbadarmaja, Ida Bagus Putu. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal EP Unud, 3 [6] : 257-264.
- Anggraini, Tika dan Sutaryo. 2014. Pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII Medan.
- Anthony, Rober N dan Govindarajan, Vijay. 2012. Sistem Pengendalian Manajemen (Terjemahan). Jakarta : Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2017. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (APBN/APBD) (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Riphat, Singgih., Setiawan, Hadi., dan Damayanty, Arie. 2016. Causality Analysis Between Financial Performance And Human Development Index: A Case Study Of Provinces In Eastern Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 20 No. 3.
- Sari, Ida Ayu Chandra Yunita dan Supadmi, Ni Luh. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3. Juni (2016).
- Suryaningsih, Ni Nyoman., Utama, Made Suryana., dan Yasa, Mahendra I.N. 2015. Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.08.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UNDP. 2016. Human Development Report 2016. Oxford University Press : New York.
- Waluyo, A. 2007. Manajemen Publik; Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.